

IMPLEMENTASI PROGRAM “*CHRISTCHURCH CALL*” PASCA SERANGAN TERORISME DI CHRISTCHURCH TAHUN 2019

Oleh : Ahmad Luthfi A.S

Pembimbing : Dr. Mhd. Saeri, M.Hum

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru, Pekanbaru

Tlp/Fax. (0761) – 63277, 23430

ABSTRAK

After the terrorist attack in Christchurch, New Zealand on March 15, 2019, Prime Minister Jacinda Ardern initiated a political meeting held in Paris on May 15, 2019, to establish international cooperation in countering terrorism known as the Christchurch Call, along with French President Emmanuel Macron.

This research employs a qualitative descriptive method, where data collection is conducted through literature review and analysis of various sources such as books, journals, official websites, and reports related to the implementation of the Christchurch Call program following the terrorist attack in Christchurch in 2019. The theoretical framework used in this research is Counter Terrorism, where actors involved engage in counteraction against acts of terrorism occurring in New Zealand.

The research findings indicate that efforts to halt terrorism involve the implementation of the Christchurch Call program, where New Zealand collaborates with France to execute the program, supported by various entities including several countries, international organizations, and technology and communication companies. The results of the program, up to this point, have received positive responses from various parties, despite some shortcomings. It is hoped that the program will continue to evolve to operate optimally in the future.

Key Word : Christchurch Cal, Terrorism, Extrimist

PENDAHULUAN

Selandia Baru sudah lama dikenal sebagai negara yang paling damai di dunia dibawah Islandia,¹ Pada 15 Maret 2019 terjadi kasus penembakan. Kejadian ini terjadi di dua masjid, yaitu Masjid Al Noor dan Linwood Islamic Center di Kota Christchurch. Insiden ini menjadi sorotan media di tingkat nasional dan internasional, memberikan dampak signifikan terutama dalam konteks sosial dan politik, baik di Selandia Baru maupun di tingkat internasional. Insiden ini menelan korban sebanyak 51 orang.²

Pelaku, Brendon Tarrant, menyiarkan serangan tersebut secara langsung melalui media sosial. Serangan terencana dengan baik dan menimbulkan dampak signifikan³ dengan korban jiwa dan luka-luka di antara jemaah yang sedang beribadah. Setelah menyerang Masjid Al Noor, pelaku melanjutkan serangannya ke Masjid Linwood, tetapi rincian terperinci tentang serangan di lokasi tersebut masih belum jelas.

Tayangan yang diunggah oleh pelaku menunjukkan aksi penembakan brutal terhadap para jemaah yang sedang beribadah di Masjid Al Noor, menyebabkan kerugian jiwa dan luka-luka. Pelaku kemudian melanjutkan serangannya ke Masjid Linwood, beberapa kilometer dari lokasi sebelumnya, meskipun detail terperinci tentang serangan di Masjid Linwood masih belum jelas.

Pihak kepolisian merespon cepat terhadap laporan penembakan di Masjid Al Noor, dan situasi menjadi sangat serius. Sebagai respons, seluruh sekolah di kota Christchurch diperintahkan untuk ditutup guna mengamankan keamanan. Serangan ini menciptakan kepanikan di kalangan masyarakat dan meninggalkan dampak psikologis yang mendalam.

Pelaku, Brenton Harrison Tarrant, segera ditahan dan dihadapkan pada sidang pengadilan dengan tuduhan pembunuhan. Respons cepat pihak kepolisian memberikan gambaran mengenai tindakan tegas dalam menangani kejadian tersebut, sementara masyarakat Christchurch harus

¹ Data *World Wide Piece Record* Tahun 2018-2019

² BBC News. (2019). "New Zealand shooting: What we know so far." Diakses pada 11 Januari 2023, dari <https://www.bbc.com/news/world-asia>

³ *Ibid.*

menghadapi trauma akibat peristiwa tragis ini.⁴

Aspek politik, agama, dan media menjadi fokus utama dalam kasus Brenton Tarrant. Pemikiran politik dari partai sayap kanan memainkan peran penting dalam membentuk pandangan Tarrant terhadap Muslim di Selandia Baru. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa Islam, sebagai agama yang menjadi target penembakan. Selain itu, peran media dalam meliput peristiwa tersebut juga memiliki dampak besar dalam penyebaran konten berbau terorisme.⁵

Setelah insiden tersebut, Selandia Baru dan Prancis bekerja sama untuk membentuk inisiatif bernama Christchurch Call, yang bertujuan untuk mengatasi tindakan terorisme, khususnya melalui media sosial dan platform online lainnya. Partisipasi Prancis dalam inisiatif ini bersama Selandia Baru menunjukkan kesamaan situasi, di mana

Prancis sendiri sering menjadi target terorisme dengan alasan serupa, terutama karena menjadi tujuan utama bagi imigran dari berbagai wilayah seperti Afrika, Asia, dan Amerika Latin.

Pertemuan Tech of Humanity pada 15 Mei 2019 melibatkan perwakilan G7, negara lain, dan perusahaan teknologi. Jacinda Arden (Perdana Menteri Selandia Baru) dan Emmanuel Macron (Presiden Prancis) mengajak pemimpin negara dan perusahaan untuk bersatu melawan terorisme.⁶ Hasilnya, dibentuk program pelaporan terorisme online yang dapat diakses oleh siapa saja dan terhubung langsung dengan pihak keamanan dan pemerintah. Program ini mendapat dukungan luas dari negara dan perusahaan teknologi, menunjukkan komitmen global dalam penanggulangan terorisme online. Kolaborasi diharapkan mampu menciptakan solusi efektif untuk mengatasi tantangan terorisme modern.

Setelah apa yang di jelaskan didapati rumusan masalah yaitu :
“Bagaimana implementasi dari

⁴ BBC Indonesia. (2019, Maret 15). Penembakan di Masjid Selandia Baru: Apa yang Kita Ketahui. Diakses dari

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47593483>
Diakses 20 Agustus 2023

⁵ Antar, Zidane Muhammad, Fawwaz Syafiq, dan Rizqullah. (2019). *"Pemicu Terjadinya Kasus Penembakan Masjid Di Selandia Baru: Agama, Politik Dan Media."* Prosiding Senas POLHI Ke-2 Universitas Wahid Hasyim Semarang,

⁶ Arden, J. (2019), Pernyataan Perdana Menteri Jacinda Arden dalam artikel *"NZ and France seek to end use of social media for acts of terrorism"*. Diakses dari <https://www.beehive.govt.nz/release/nz-and-france-seek-end-use-social-media-acts-terrorism> tanggal 12 Desember 2022,

program “Christchurch Call” pasca serangan terorisme yang terjadi di Kota Christchurch, Selandia Baru.”

KERANGKA TEORI

Teori Counter Terrorism

Counter Terrorism merupakan sebuah upaya untuk melawan tindakan terorisme. Menurut Todd Sandler upaya counter terrorism dibedakan mejadi dua cara. Dua cara yang dilakukan dengan *hard Power* dan *soft Power*⁷. *Hard Power* merupakan penindakan terorisme dengan melibatkan pihak keamanan dan langsung melakukan tindakan secara langsung terhadap pelaku. Sementara cara *Soft Power* yaitu dengan metode deradikalisasi yaitu dengan megubah mindset tentang ideologi, dan kepercayaan.

Karena penanganan terorisme dengan cara *hard power* dirasa tidak sepenuhnya bisa menangani permasalahan terhadap kelompok ekstrimis, maka cara *soft power* digunakan. Metode ini diperkenalkan pada tahun 2011 terutama di Amerika

pada era pemerintahan Barrack Obama dengan meresmikan "*White House Countering Violent Extremism Strategy*" Program yang kemudian dikenal dengan "*Countering Violent Extremism* " (CVE) yang merupakan salah satu upaya untuk menghambat orang Amerika ataupun seluruh dunia untuk bergabung kedalam kelompok ekstrimisme yang biasanya menimbulkan tindakan terorisme. Dalam CVE ini perlu digaris bawahi kata "ekstrimisme" merupakan mengarah pada kelompok Islam fundamental yang memiliki pemahaman yang kuat seperti apa yang dilakukan oleh ISIS dan Al-Qaeda.⁸

Cara ini dipandang lebih efektif dalam hal yang berkaitan dengan munculnya tindakan terorisme. Respon terkait tindakan terorisme bukan lagi tentang aksi penyelidikan dan aksi militer tapi bagaimana mencegah aksi terorisme sebelum hal itu terjadi dengan cara lebih ringan dan lebih bersahabat.⁹

⁷ Sandler, T. (2005). Collective versus Unilateral Responses to Terrorism. *Public Choice*, 124, 75-93. Diakses dari <http://ejournal.undip.ac.id> pada 20 Feb 2023.

⁸ Frazer, O., & Nünlist, C. (2015). *The Concept of Countering Violent Extremism*. CSS Analysis in Security Policy No. 183.

⁹ Wahyu Pramahardika, Vidi Galenso Syarief “Counter-Terrorism Dalam Upaya Pencegahan Terorisme ISIS di Kawasan Asia Tenggara” JURNAL ILMIAH PUBLIKA, Vol 10, no 2.EDISI JULI – DESEMBER 2022 Hal. 442

Dalam aksi terorisme banyak faktor yang memicu terjadinya tindakan terorisme seperti faktor ekonomi, faktor budaya, faktor keagamaan. Tujuan jangka panjang organisasi teror mencakup penggulingan rezim dan pendirian sistem politik baru berdasarkan ideologi tertentu. Sementara itu, tujuan jangka pendek melibatkan tindakan intimidasi, memaksa ketaatan pada keputusan, manipulasi untuk mencapai tujuan, dan merekrut anggota. Organisasi teror juga bertujuan melemahkan otoritas negara, menuduh pemerintahan krisis kepemimpinan, dan memprovokasi perlawanan terhadap pihak berwenang.¹⁰

METODOLOGI PENELITIAN

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun mengenai metode kualitatif menurut Denzin dan Lincoln ialah sebuah metode yang menafirkan tujuan dengan latar ilmiah.¹¹ Oleh karena itu penulis menggunakan

metode penelitian kualitatif dan pembelajaran pustaka.

Pengumpulan data menggunakan metode deskriptif kualitatif lebih menitik beratkan pada suatu rangkaian kata yang memberikan sebuah data seperti gambar maupun dokumentasi, bukan dalam bentuk angka.¹² Metode ini dipilih supaya data yang disajikan lebih kredibel.

PEMBAHASAN

1. Terorisme di Selandia Baru

Aksi terorisme di Selandia Baru dipicu oleh meningkatnya Islamophobia, dengan teknologi komunikasi global memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekstremisme. Penyebaran propaganda kelompok ekstrem kanan dan neo-Nazi melalui internet, serta perpindahan para pelaku ke platform sulit dijangkau setelah upaya pembatasan Google, menjadi tantangan utama. Media sosial juga berkontribusi pada polarisasi masyarakat dengan menyebarkan propaganda dan berita palsu, yang memicu ketakutan, kemarahan, dan kecemasan. Untuk mengatasi hal ini, penanggulangan

¹⁰ Ünsal, N. (1996). *Terör Olgusu ve Türkiye Gerçeği. Ankara: Dönüşüm Yayınevi. Dikutip dalam "TERROR AND TERRORISM: A MULTI-DIMENSIONAL EVALUATION," 2009, oleh Dr. Orhan Erdem dan Dr. Habib Özdemir, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi.

¹¹ Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (1994). *Handbook of qualitative research*. Thousand Oaks, London, New Delhi.

¹² Emzir, (2011) Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 3

terorisme perlu melibatkan tindakan kolaboratif baik di tingkat lokal maupun global untuk membatasi penyebaran ideologi ekstremisme melalui platform digital.¹³

Ekstremis kanan memanfaatkan internet untuk menyebarkan pemikiran supremasi kulit putih, Islamophobia, dan misogini, menggunakan media sosial dan propaganda untuk memecah belah masyarakat. Meskipun upaya pelarangan situs ekstrem kanan, mereka sering beralih ke platform yang sulit dijangkau. Strategi manipulasi massa di internet melalui berita palsu dan propaganda dapat memicu tindakan kekerasan dengan meningkatkan ketakutan dan kemarahan. Teroris memiliki tujuan jangka pendek, seperti pengakuan dan merusak infrastruktur, dan tujuan jangka panjang, seperti perubahan pemerintahan dan pengaruh kebijakan. Kerja sama antara kelompok teroris dan negara mencakup pertukaran sumber daya, perlindungan, tenaga ahli, dan operasi bersama.¹⁴

¹³ “Empat hal yang dapat diambil dari serangan terror Selandia Baru”<https://theconversation.com/empat-hal-yang-dapat-diambil-dari-serangan-terror-selandia-baru-113850> diakses 18 Juni 2023

¹⁴ *Ibid.*

Kasus terorisme di Christchurch, Selandia Baru, dengan 51 korban di dua masjid, menciptakan dampak traumatis. Pelaku, Brenton Tarrant, berusaha menimbulkan korban sebanyak mungkin. Meskipun demikian, upaya pemerintah dan masyarakat Selandia Baru dalam mengembalikan rasa aman, terutama bagi komunitas Muslim, berhasil, meningkatkan tingkat toleransi antaragama. Dua warga Indonesia yang tinggal di Selandia Baru menyaksikan peran positif pemerintah dan masyarakat dalam mendukung komunitas Muslim. Insiden ini juga memicu minat masyarakat untuk lebih memahami agama Islam¹⁵, meskipun jumlah Muslim di negara tersebut hanya 1% dari total populasi. Pernyataan Perdana Menteri Ardern menegaskan inklusi, penghormatan, dan penolakan terhadap kekerasan terhadap komunitas Muslim, menunjukkan dukungan terhadap mereka sebagai bagian integral dari masyarakat Selandia Baru.¹⁶

¹⁵ Diakses Dari “Penembakan di dua masjid Selandia Baru: Cerita WNI jelang vonis pelaku, sempat merasa takut, tapi dapat dukungan penuh, dan toleransi semakin kuat”
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53885031>
diakses 5 Juli 2023

¹⁶ Diakses dari
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190315120328-4-60873/tragedi-penembakan-masjid->

Gambar 2. 1

Keadaan Masjid Al Noor pasca kasus penembakan



Sumber : (VOAIndonesia.com)

Dalam era posttruth, dinamika sosial dan politik menunjukkan bahwa daya tarik emosional lebih berpengaruh daripada fakta sebenarnya dalam membentuk opini publik. Fenomena ini, dicatat oleh Oxford Dictionaries¹⁷ sejak 2016, menjadi masalah serius karena beberapa pihak memanfaatkan media secara tidak etis untuk mencapai kepentingan mereka. Contoh nyata adalah serangan teror di Selandia Baru oleh Tarrant, yang menunjukkan dampak negatif penyebaran informasi yang tidak benar dalam merangsang perasaan emosional dan memicu kekerasan. Ancaman

[selandia-baru-banyak-korban-tewas](#) 8 juli 2023 pukul 8.45

¹⁷ BAIHAKI, E. (2019, March 13). era post truth adalah. Retrieved from Indonesia, Selamat Datang di Era "Post-Truth" <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/13/09014261/luntarnya-kearifanberpolitik-di-era-post-truth?page=all> dikutip dari Muhammad Fawwaz Syafiq Rizqullah, Antar Zidane.2019 *Op.Cit*

terhadap keamanan masyarakat menekankan perlunya kehati-hatian dalam mengonsumsi informasi media serta pentingnya pendidikan, kesadaran, dan kritisisme untuk membantu masyarakat menyaring informasi yang benar dan mengidentifikasi upaya manipulatif demi kepentingan tertentu tanpa memedulikan konsekuensinya.

Brenton Tarrant, 28 tahun, menyatakan bahwa latar belakangnya dari keluarga kelas pekerja miskin memotivasi serangan teror di Christchurch, Selandia Baru. Tarrant merencanakan tindakan tersebut selama dua tahun, dengan tujuan mengurangi imigrasi ke Eropa dan menegaskan keberlanjutan tanah airnya.

Anti Defamation League (ADL) menyatakan bahwa kelompok supremasi kulit putih menyalahkan orang Yahudi atas imigrasi non-putih ke Amerika Serikat. Pada Agustus 2017, dalam unjuk rasa kelompok nasionalis kulit putih di Universitas Virginia di Charlottesville, peserta unjuk rasa melantunkan ungkapan "Orang Yahudi tidak akan menggantikan kami!" yang menjadi sorotan.¹⁸

¹⁸ Dustin Jones "What is the 'great replacement' and how is it tied to the Buffalo shooting

Meskipun dia menargetkan Selandia Baru, motivasinya lebih terkait dengan keadaan umum di Barat yang dianggapnya kaya dan aman dari penjajahan. Tarrant menggambarkan serangan sebagai "balas dendam" atas sejarah penjajahan di Eropa. Meski tidak terhubung dengan jaringan terorisme, serangan ini menunjukkan kemunculan ideologi supremasi kulit putih. Kejadian serupa, seperti penembakan di sinagoge Tree of Life di Pittsburgh pada Oktober 2018 oleh Robert Bowers, mengungkapkan motif serupa dalam menyalahkan komunitas Yahudi atas imigrasi non-kulit putih ke Amerika Serikat.

2. Kebijakan Pemerintah Selandia Baru Tentang Terorisme tahun 2019

Pasca serangan terorisme di Selandia Baru, upaya telah dilakukan untuk mengatasi ekstremisme dan tindakan terorisme. Pemerintah Selandia Baru telah mengambil langkah-langkah untuk memulihkan situasi dan mencegah terorisme di negara tersebut. Tindakan kriminal terorisme seringkali terkait

dengan isu-isu pokok yang muncul akibat tindakan sewenang-wenang oleh beberapa negara besar melalui pemerintahannya, memicu radikalisme di kelompok tertentu yang merasa terpinggirkan, yang dapat melahirkan tindakan teror atau terorisme.¹⁹

Pemerintah Selandia Baru merespons serangan di Christchurch dengan membentuk Royal Commission untuk menyelidiki kasus tersebut. Komisi ini bertugas mendalami motif pelaku dan mengevaluasi respons kepolisian, militer, dan badan intelijen. Selain itu, Selandia Baru telah memiliki undang-undang terorisme sejak 2014, memberikan izin pengawasan video selama 24 jam tanpa surat perintah khusus, serta memberlakukan pembatalan paspor selama tiga tahun bagi yang dicurigai terlibat dalam aktivitas terorisme. Undang-Undang Antiterorisme ini direspon terhadap situasi global, terutama berkaitan dengan ISIS, dan mendapat dukungan dari

suspect?"
<https://www.npr.org/2022/05/16/1099034094/what-is-the-great-replacement-theory> Diakses 23 Agustus 2023

¹⁹ Masyar, A. (2009). *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme: Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Bandung: CV. Mahdar Maju.

oposisi Partai Buruh, berlaku hingga tahun 2017.²⁰

Dalam undang-undang terorisme yang baru ini memberi wewenang kepada kepolisian untuk masuk ke properti terduga pelaku tanpa harus ada surat perizinan terlebih dahulu yang bertujuan untuk menghindari perencanaan seperti melakukan tindakan balasan oleh pelaku.²¹

Adanya amandemen undang-undang *Arm Act* 1983 atau undang-undang tentang kepemilikan dan penggunaan senjata api juga menjadi respon pemerintah Selandia Baru terhadap tindakan terorisme.

Pada 12 April 2019, sebagai respons terhadap serangan teroris di Christchurch, pemerintah Selandia Baru mengeluarkan larangan terhadap mayoritas senjata api semi-otomatis melalui amandemen Undang-Undang Senjata Api 1983. Larangan ini mencakup senapan semi-otomatis dengan kaliber di atas 22 dan magazin terpisah, senapan dengan magazin yang

mampu menampung lebih dari 10 peluru, serta senapan pampas semi-otomatis dengan magazin berbentuk tabung yang mampu menampung lebih dari 5 peluru. Sejumlah barang terlarang termasuk magazin dan bagian tambahan untuk senjata api. Izin impor hanya diberikan kepada beberapa orang yang dikecualikan dengan batasan tertentu setelah tanggal tersebut.²² Larangan ini berlaku secara nasional dan merupakan bagian dari upaya Selandia Baru dalam kerjasama internasional, terutama dalam program Christchurch Call yang melibatkan Prancis dan pihak lainnya.

Christchurch Call adalah inisiatif pemerintah Selandia Baru untuk menghapus konten teroris dan ekstremis dari internet, melibatkan kesepakatan dengan penyedia layanan daring. Diprakarsai oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern dan Presiden Prancis Emmanuel Macron, kesepakatan ini menegaskan pentingnya menjaga internet yang bebas, terbuka, dan aman. Dukungan internasional terbentuk pada 15 Mei 2019 di Paris sebagai respons terhadap penyebaran langsung serangan

²⁰ "Selandia Baru Sahkan UU Antiterorisme" https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/12/141210_selandia_baru Diakses 27 Agustus 2023

²¹ Eka Yudha Saputra "Selandia Baru Sahkan Undang-undang Terorisme Yang Baru" <https://dunia.tempo.co/read/1512211/selandia-baru-sahkan-undang-undang-anti-terorisme-yang-baru> Diakses 28 Agustus 2023

²² "Change of The Arm Act 1983" <https://www.customs.govt.nz/about-us/news/important-notices/changes-to-the-arms-act-1983/> Diakses 30 Agustus 2023

teror di Christchurch melalui platform Facebook.²³

Kemajuan teknologi dalam era internet yang bebas, terbuka, dan aman membawa manfaat besar dalam konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, penyalahgunaan oleh pelaku teroris dan ekstremis kekerasan menjadi masalah serius yang diperkuat oleh serangan teror di Christchurch pada 15 Maret 2019. Christchurch Call diinisiasi untuk menjaga kemandirian, kebebasan, dan keamanan internet serta penggunaannya. Meskipun melibatkan upaya mengatasi konten teroris dan ekstremis, program ini bertujuan melindungi sifat terbuka internet tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi. Fokusnya adalah pada dampak buruk konten kekerasan online terhadap hak asasi manusia korban, keamanan global, dan masyarakat secara luas, dengan komitmen untuk menghormati kebebasan berbicara dan mendukung upaya mengatasi narasi-narasi tertentu.²⁴

Era globalisasi, didorong oleh kemajuan teknologi, memberikan dampak ganda dengan potensi positif dan negatif. Oleh karena itu, perhatian bersama dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil penting dalam mengembangkan dan memperkuat teknologi informasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, individu dan lembaga dapat berbagi ide dan inovasi secara global, mereduksi hambatan budaya, dan mendorong sikap toleransi terhadap keberagaman. Namun, media sosial, sebagai produk dari teknologi ini, juga memiliki sisi gelap dengan potensi memfasilitasi xenophobia, terutama melalui live streaming, yang dapat menjadi sumber kebencian. Studi-studi di Selandia Baru menunjukkan fenomena ini, menekankan perlunya memahami dampak media sosial dalam konteks keterbukaan dan intoleransi.²⁵

Christchurch Call, meskipun penting dalam menangani terorisme daring,

²³ Diakses dari “*Christchurch Call Story*”
<https://www.christchurchcall.com/about/the-christchurch-call-story/> tanggal 21 Juli 2023

²⁴ Diakses dari “India Backs 'Christchurch Call' to Stamp Out Digital Hate Culture at Paris Summit,” The Wire, May 16, 2019,
<https://thewire.in/world/full-text-christchurch-call-online-extremismnew-zealand-india>. Dikutip dari Priyal Pandey. "About Christchurch Call,"

Christchurch Call, 2019. Jurnal ORF ISSUE BRIEF "*One Year Since Christchurch Call to Action: A Review* oleh Agustus 2020 Issue No. 389 Hal.3

²⁵ Charles Crothers dan Thomas O'Brien
KOTUITUI: NEW ZEALAND JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES ONLINE 2020, VOL. 15, NO. 2, Hal 252
://doi.org/10.1080/1177083X.2020.1746364

menghadapi tantangan dalam pendekatan inklusif. Pembentukan program ini oleh Prancis dan Selandia Baru tanpa melibatkan masyarakat secara luas menciptakan ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan. Rekomendasi dikembangkan secara tertutup, mengurangi transparansi dan pengaruh masyarakat sipil. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan transparansi, konsultasi yang terbatas dengan masyarakat sipil membatasi peran mereka dalam implementasi program.²⁶

Beberapa pihak yang ikut bekerjasama antara lain adalah G7, G20, dan beberapa organisasi lain seperti *The Global Community Engagement and Resilience Fund* (GCERF), *Tech Against Terrorism*, UNESCO, *Council of Europe* kemudian beberapa perusahaan teknologi seperti Google, Facebook (Meta) dan lain lain.

3. Proses bergabung

Christchurch Call adalah program multistakeholder yang mewajibkan komitmen sesuai prinsip-prinsip utama

seperti transparansi dan penghormatan hak asasi manusia. Dikelola oleh Sekretariat Christchurch Call dari Prancis dan Selandia Baru, program ini menetapkan prioritas dalam mengatasi konten teroris dan ekstremis online melalui pertemuan pemimpin dan berbagai kegiatan seperti diskusi kebijakan dan webinar. Fokus utamanya adalah transparansi, keterlibatan, dan pertukaran informasi mengenai regulasi, inovasi, pendidikan, dan respons krisis..²⁷

Sebelum bergabung dengan Christchurch Call, kelompok harus melewati serangkaian langkah. Calon pendukung dan mitra berinteraksi dengan pejabat Prancis dan/atau Selandia Baru melalui pertemuan daring untuk memahami proyek dan organisasi yang dijalankan. Setelah diskusi pengenalan, mereka mempelajari The Christchurch Call Commitment dan prinsip-prinsip intinya. Calon pendukung mengonfirmasi niat mereka secara tertulis untuk melanjutkan proses, termasuk pertimbangan kesesuaian pekerjaan dan kebijakan mereka dengan

²⁶ Access Now on the Christchurch Call: rights, wrongs, and what's next. <https://www.accessnow.org/access-now-on-the-christchurch-call-rights-wrongs-and-whats-next/> Diakses 26 Oktober 2023

²⁷ "Joining the Christchurch Call Community" <https://www.christchurchcall.com/our-community/joining-the-christchurch-call-community/> Diakses 31 Oktober 2023

komitmen Christchurch Call, yang dibagikan rahasia dengan Komunitas Call. Pertemuan daring berikutnya memfasilitasi interaksi lebih lanjut antara Komunitas Call, calon pendukung, dan mitra. Langkah terakhir melibatkan pertimbangan oleh Sekretariat Christchurch Call untuk mengumumkan keputusan akhir kepada pihak yang ingin bergabung.²⁸

Komitmen-komitmen dalam Christchurch Call merupakan kerja sama sukarela untuk mengatasi isu-isu kompleks di lingkungan digital, mencerminkan tekad sungguh-sungguh untuk kemajuan. Langkah positif ini bertujuan menjaga internet yang aman dan terbuka. Sekretariat Christchurch Call mengoordinasikan berbagai kegiatan, termasuk kelompok kerja, diskusi kebijakan, dan seminar web, dengan undangan terbuka kepada semua anggota komunitas untuk berpartisipasi aktif. Kerja sama terbuka dan pertukaran informasi mengenai prioritas bersama, seperti regulasi, alat inovatif, pendidikan, dan respons dalam situasi krisis, sangat didukung dan dianjurkan.²⁹

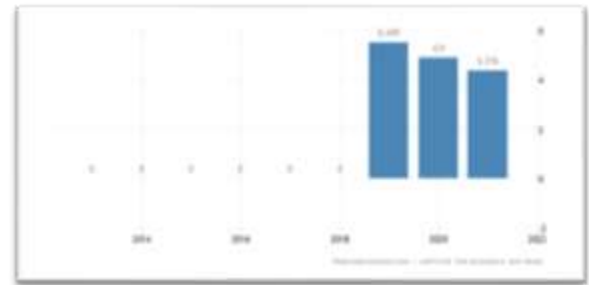
²⁸ Ibid.

²⁹ "Three new Member Join The Christchurch Call" <https://www.christchurchcall.com/media->

4. Berlangsungnya Program Christchurch Call

Gambar 4.1.1

Indeks terorisme di Selandia Baru tahun
2019-2022



Sumber:

<https://id.tradingeconomics.com/new-zealand/terrorism-index>

Christchurch Call, yang dipimpin bersama oleh Pemerintah Prancis dan Selandia Baru, memiliki Sekretariat yang berkolaborasi dengan masyarakat sipil, pemerintah, mitra organisasi, dan penyedia layanan online di seluruh Komunitas Call. Mereka berfokus pada penghapusan konten teroris dan ekstremis kekerasan daring, dengan komitmen terhadap prinsip-prinsip Christchurch Call. Inisiatif ini, sebagai respons terhadap serangan di Christchurch, menekankan pentingnya kerjasama multistakeholder, hak asasi

[and-resources/news-and-updates/three-new-members-join-the-christchurch-call/](https://www.christchurchcall.com/media-and-resources/news-and-updates/three-new-members-join-the-christchurch-call/) diakses 9 Oktober 2023

manusia, dan keamanan internet. Pidato Perdana Menteri Jacinda Ardern mencatat kemajuan dalam pengembangan protokol respons krisis dan transformasi Global Internet Forum to Counter Terrorism (GIFCT), dengan mengucapkan terima kasih kepada semua pendukung dan masyarakat sipil yang terlibat.³⁰

Christchurch Call menggabungkan beberapa inisiatif kunci untuk menanggapi isu konten teroris dan ekstremis secara online. Pemahaman Algoritma fokus pada analisis dan adaptasi algoritma untuk mencegah konten berbahaya, sementara Crises Response melibatkan upaya tanggap pasca-serangan dan pengembangan protokol. Program juga menyoroti Meningkatkan Transparansi dengan merilis laporan dan memperkuat pemahaman terkait dampak tindakan. Selain itu, Isu dan Tema Lintas Sektor menekankan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, perlindungan korban berbasis gender, dan kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi tantangan

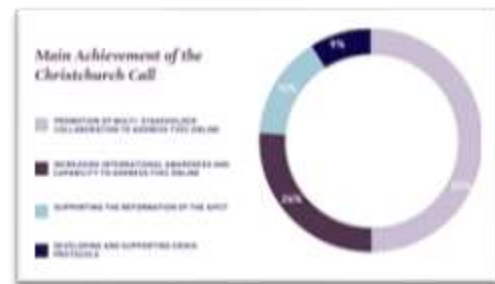
³⁰ Pidato dari Perdana Menteri Jacinda Arden “Remark to Christchurch Call Leader’s Dialogue” <https://www.beehive.govt.nz/speech/remarks-christchurch-call-leaders%E2%80%99-dialogue> Diakses 3 Sept 2023

regulasi daring. Semua langkah ini menciptakan kerjasama antarstakeholder untuk mencapai lingkungan daring yang lebih aman dan mendukung.

Terkait dengan bagaimana efektifitas dari Christchurch Call sejauh ini, terdapat sruvei yang dilakukan dengan komunitas program dan juga dengan penasihat program atau *Christchurch Call Advisory Network* (CCAN) ini terdapat 39 responden dalam survei yang dilakukan pada 21 September hingga 30 Oktober 2020.³¹

Gambar 4.1. 2

Respon dari Para Pendukung Dan CCAN Mengenai pencapaian Program Christchurch Call



Sumber :Christchurch Call Community Consultan Report

Sebanyak 50% suara mendukung pendekatan multistakeholder dalam mengatasi penyalahgunaan internet oleh

³¹ “Christchurch Community Consultan Report” <https://www.christchurchcall.com/assets/Documents/Chch-Call-Community-Consultation-Report-2021.pdf> Hal. 4 Diakses 3 Sept 2023.

teroris dan ekstremis kekerasan, melibatkan kerjasama antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil, khususnya dalam menghadapi serangan serupa Christchurch. Sementara itu, 26% responden mengakui bahwa Christchurch Call berhasil meningkatkan kesadaran global tentang perlunya melindungi internet dari penyalahgunaan oleh teroris dan ekstremis kekerasan, serta penyebaran konten Terrorism and Violent Extremist Content (TVEC) secara online.

Sebanyak 15% responden mendukung restrukturisasi GIFCT menjadi organisasi multistakeholder yang independen, dengan peran Christchurch Call dalam mengawal proses ini dan mendukung tiga pilar strategis GIFCT,³² yaitu Prevent (kesadaran masyarakat), Respond (merangkul pemangku kepentingan), dan Learn (mendukung inisiatif penelitian praktis). Sementara itu, 9% responden menginginkan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dari program ini.³³ Sebagian kecil responden menganggap Program ini efektif, tetapi

Selandia Baru dan Prancis, sebagai pendiri, perlu merespons pandangan 42% yang memerlukan tindakan lebih lanjut. Ini termasuk komitmen yang lebih kuat terhadap pekerjaan Panggilan dan melibatkan masyarakat sipil serta komunitas Panggilan dalam upaya berkelanjutan. Laporan akhir Konsultasi Komunitas Christchurch Call pertama adalah langkah awal yang berharga dalam mengatasi masalah ini dan menjadi dasar untuk pekerjaan di masa depan.³⁴

5. Hambatan Program

Meskipun tahun pertama pelaksanaan program Christchurch Call telah mencapai kemajuan yang signifikan, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Pentingnya meningkatkan pemahaman tentang peran algoritma dalam mempromosikan konten di internet dan mengidentifikasi titik-titik campur tangan yang dapat diambil oleh pihak berwenang untuk menghentikan penyebaran konten teroris atau ekstremis.

Selain itu, diperlukan langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan algoritma oleh pihak

³²*Ibid.* Hal 66-67

³³ GIFCT's strategic planning and programming centers on three pillars <https://gifct.org/> Diakses 5 Sept 2023

³⁴ "Christchurch Community Consultation Report" *Op.cit.* Hal.78

yang dapat memanfaatkannya untuk tujuan yang merugikan. Terakhir, pemahaman mendalam tentang teknologi dan algoritma yang digunakan di berbagai platform online perlu diperkuat guna melawan konten berbahaya dan menjaga keamanan internet secara menyeluruh.³⁵

Perbedaan budaya, bahasa, dan regulasi di setiap negara menjadi hambatan utama dalam pengembangan program Christchurch Call. Kerangka hukum dan regulasi internet yang berbeda serta keberagaman budaya dan bahasa mempersulit upaya untuk melawan penyebaran pesan ekstremis online. Diperlukan upaya kolaboratif yang cermat dan sensitif terhadap konteks budaya dan hukum setiap negara untuk mencapai tujuan program ini. Sementara itu, ketidak-konsistenan dan keterbatasan sumber daya, bersama dengan perselisihan kepentingan, juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini. Perbedaan penerapan dan sistem hukum di setiap negara juga

menjadi faktor penghambat yang perlu diatasi agar program ini berjalan efektif.

SIMPULAN

Pelaku penembakan di Christchurch, Selandia Baru pada 15 Maret 2019 adalah Brenton Tarrant. Aksi tersebut tidak dapat disamakan dengan aksi terorisme sekelompok atau jaringan terorganisir seperti ISIS atau Al Qaeda. Pemerintah Selandia Baru dan Prancis bersama-sama membentuk program Christchurch Call untuk menanggulangi kasus terorisme daring dan ekstrimisme. Program ini berfokus pada analisis algoritma, pengembangan protokol, dan kerjasama internasional, dengan membuka keanggotaan terbuka bagi siapa pun yang ingin bergabung. Meskipun efektif, program ini dihadapi oleh tantangan global dalam bahasa, budaya, dan peraturan hukum, serta perlunya meningkatkan kesadaran dan kapabilitas platform kecil untuk menangani konten berbahaya dan faktor kebencian berbasis gender yang dapat memicu ekstrimisme dan terorisme daring.

DAFTAR PUSTAKA

Access Now on the Christchurch Call: rights, wrongs, and what's next.
<https://www.accessnow.org/access-now-on-the-christchurch-call-rights-wrongs-and-whats-next/> Diakses 26 Oktober 2023

³⁵ "Significant global progress made under Christchurch Call"
<https://www.christchurchcall.com/media-and-resources/news-and-updates/new-news-article-page-7/> Diakses 5 Sept 2023.

- Antar, Zidane Muhammad, Fawwaz Syafiq, dan Rizqullah. (2019). "Pemicu Terjadinya Kasus Penembakan Masjid Di Selandia Baru: Agama, Politik Dan Media." Prosiding Senas POLHI Ke-2 Universitas Wahid Hasyim Semarang,
- Ardern, J. (2019), Pernyataan Perdana Menteri Jacinda Ardern dalam artikel "NZ and France seek to end use of social media for acts of terrorism". Diakses dari <https://www.beehive.govt.nz/release/nz-and-france-seek-end-use-social-media-acts-terrorism> tanggal 12 Desember 2022,
- BAIHAKI, E. (2019, March 13). era post truth adalah. Retrieved from Indonesia, Selamat Datang di Era "Post-Truth"
- BBC News. (2019). "New Zealand shooting: What we know so far." Diakses pada 11 Januari 2023, dari <https://www.bbc.com/news/world-asia>
- BBC Indonesia. (2019, Maret 15). Penembakan di Masjid Selandia Baru: Apa yang Kita Ketahui. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47593483> Diakses 20 Agustus 2023
- BBC News. Penembakan di dua masjid Selandia Baru: Cerita WNI jelang vonis pelaku, sempat merasa takut, tapi dapat dukungan penuh, dan toleransi semakin kuat" <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53885031> diakses 5 Juli 2023
- BBC Indonesia "Selandia Baru Sahkan UU Antiterorisme" https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/12/141210_selandia_baru Diakses 27 Agustus 2023
- CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190315120328-4-60873/tragedi-penembakan-masjid-selandia-baru-banyak-korban-tewas> 8 juli 2023 pukul 8.45
- Charles Crothers dan Thomas O'Brien KOTUITUI: NEW ZEALAND JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES ONLINE 2020, VOL. 15, NO. 2
- "Change of The Arms Act 1983" <https://www.customs.govt.nz/about-us/news/important-notice/changes-to-the-arms-act-1983/> Diakses 30 Agustus 2023
- "Christchurch Call Story" <https://www.christchurchcall.com/about/the-christchurch-call-story/> tanggal 21 Juli 2023.
- "Christchurch Community Consultation Report" <https://www.christchurchcall.com/assets/Documents/Chch-Call-Community-Consultation-Report-2021.pdf> Diakses 3 Sept 2023.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (1994). *Handbook of qualitative research*. Thousand Oaks, London, New Delhi.
- Dustin Jones "What is the 'great replacement' and how is it tied to the Buffalo shooting suspect?" <https://www.npr.org/2022/05/16/1099034094/what-is-the-great-replacement-theory> Diakses 23 Agustus 2023 Emzir, (2011) Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 3
- Eka Yudha Saputra "Selandia Baru Sahkan Undang-undang Terorisme Yang Baru" <https://dunia.tempo.co/read/1512211/selandia-baru-sahkan-undang-undang-anti-terorisme-yang-baru> Diakses 28 Agustus 2023
- "Empat hal yang dapat diambil dari serangan terror Selandia Baru" <https://theconversation.com/empat-hal-yang-dapat-diambil-dari-serangan-teror-selandia-baru-113850> diakses 18 Juni 2023
- Frazer, O., & Nünlist, C. (2015). *The Concept of Countering Violent Extremism*. CSS Analysis in Security Policy No. 183.
- GIFCT's strategic planning and programming centers on three pillars <https://gifct.org/> Diakses 5 Sept 2023
- "India Backs 'Christchurch Call' to Stamp Out Digital Hate Culture at Paris Summit," The Wire, May 16, 2019, <https://thewire.in/world/full-text->

[christchurch-call-online-extremismnew-zealand-india](#). Dikutip dari Priyal Pandey. "About Christchurch Call," Christchurch Call, 2019. Jurnal ORF ISSUE BRIEF "One Year Since Christchurch Call to Action: A Review oleh Agustus 2020 Issue No. 389

"Joining the Christchurch Call Community"
<https://www.christchurchcall.com/our-community/joining-the-christchurch-call-community/> Diakses 31 Oktober 2023

Masyar, A. (2009). Gaya Indonesia Menghadang Terorisme: Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Bandung: CV. Mahdar Maju. Sandler, T. (2005). Collective versus Unilateral Responses to Terrorism. *Public Choice*, 124, 75-93. Diakses dari <http://ejournal.undip.ac.id> pada 20 Feb 2023.

"Remark to Christchurch Call Leader's Dialogue"
<https://www.beehive.govt.nz/speech/remarks-christchurch-call-leaders%E2%80%99-dialogue> Diakses 3 Sept 2023

"Three new Member Join The Christchurch Call"
<https://www.christchurchcall.com/media-and-resources/news-and-updates/three-new-members-join-the-christchurch-call/> diakses 9 Oktober 2023

Ünsal, N. (1996). *Terör Olgusu ve Türkiye Gerçeği. Ankara: Dönüşüm Yayınevi. Dikutip dalam "TERROR AND TERRORISM: A MULTI-DIMENSIONAL EVALUATION," 2009, oleh Dr. Orhan Erdem dan Dr. Habib Özdemir, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi.

Wahyu Pramahardika, Vidi Galenso Syarief "Counter-Terrorism Dalam Upaya Pencegahan Terorisme ISIS di Kawasan Asia Tenggara" JURNAL ILMIAH PUBLIKA, Vol 10, no 2. EDISI JULI – DESEMBER 2022.